

Implementasi Kurikulum Merdeka: antara Fleksibilitas Kurikulum, Kesiapan Guru, dan Ketimpangan Dukungan Sekolah

INFO PENULIS

Waode Nurmahaemin
Pendis Kanwil Prov Sultra
engkaapo@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 2807-9558
Vol. 6, No.2 Agustus 2026
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajup>

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Nurmahaemin, W. (2026). Pembelajaran Sejarah Berbasis Kurikulum Merdeka: Analisis Pelaksanaan, Faktor Pendukung, dan Penghambat di SMA Negeri 1 Tolangohula. *Arus Jurnal Pendidikan*, 6 (2), 875-879.

Abstrak

Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberi ruang lebih luas bagi satuan pendidikan dan guru dalam mengembangkan pembelajaran yang kontekstual, fleksibel, dan berpusat pada peserta didik. Namun, fleksibilitas kebijakan tidak otomatis menghasilkan perubahan praktik di kelas. Artikel ini bertujuan mengkaji bagaimana literatur menggambarkan implementasi Kurikulum Merdeka, terutama terkait pemahaman dan kesiapan guru, perencanaan pembelajaran, pembelajaran berdiferensiasi, asesmen, serta dukungan kelembagaan. Penelitian menggunakan tinjauan literatur kualitatif dengan sintesis tematik terhadap sepuluh artikel jurnal yang relevan, terutama terbit pada 2023–2025. Hasil sintesis menunjukkan bahwa implementasi berlangsung melalui proses adaptasi yang tidak seragam. Guru memperoleh peluang untuk merancang pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa, tetapi menghadapi tantangan dalam menerjemahkan capaian pembelajaran menjadi tujuan dan modul ajar, menerapkan diferensiasi di kelas besar, mengembangkan asesmen, serta memanfaatkan teknologi. Perbedaan fasilitas, pelatihan, kepemimpinan sekolah, dan akses terhadap sumber belajar turut membentuk variasi pelaksanaan. Artikel ini menegaskan bahwa keberhasilan Kurikulum Merdeka tidak cukup diukur dari dokumen administrasi atau status penerapan, melainkan dari perubahan pengalaman belajar siswa dan dukungan nyata bagi guru.

Kata Kunci: Kurikulum Merdeka, Kesiapan Guru, Pembelajaran Berdiferensiasi, Asesmen, Implementasi Kurikulum.

The Merdeka Curriculum is designed to give schools and teachers greater flexibility to develop contextual, adaptable, and student-centred learning. However, policy flexibility does not automatically lead to changes in classroom practice. This article examines how the literature describes the implementation of the Merdeka Curriculum, particularly in relation to teachers' understanding and readiness, lesson planning, differentiated instruction, assessment, and institutional support. The study employs a qualitative literature review and thematic synthesis of ten relevant journal articles, primarily published between 2023 and 2025. The synthesis indicates that implementation involves uneven processes of adaptation. Teachers have opportunities to design learning that better responds to students' needs, yet they face challenges in translating learning outcomes into learning objectives and teaching modules, implementing differentiation in large classes, developing assessment practices, and integrating technology. Differences in facilities, professional training, school leadership, and access to learning resources also shape implementation. The article argues that the success of the Merdeka Curriculum should not be measured solely by administrative documents or implementation status, but by changes in students' learning experiences and the practical support provided to teachers.

Keywords: Merdeka Curriculum, Teacher Readiness, Differentiated Instruction, Assessment, Curriculum Implementation.

A. Pendahuluan

Perubahan kurikulum selalu membawa janji perbaikan, tetapi janji itu baru memperoleh makna ketika sampai ke ruang kelas. Kurikulum Merdeka hadir dengan gagasan memberi keleluasaan lebih besar kepada sekolah dan guru untuk merancang pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Guru tidak semata-mata menjalankan urutan materi yang seragam, melainkan diharapkan membaca konteks kelas, mengidentifikasi kebutuhan belajar, dan memilih strategi yang relevan. Perubahan ini penting, sebab siswa datang ke sekolah dengan kemampuan awal, minat, pengalaman, dan dukungan keluarga yang berbeda-beda. Meski demikian, kebijakan yang memberi keleluasaan juga menuntut kapasitas profesional yang lebih besar. Guru perlu memahami capaian pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran dan alurnya, menyusun modul ajar, memilih metode, serta merancang asesmen yang membantu proses belajar. Penelitian Candra dan Wahzudik (2024) memperlihatkan bahwa guru dapat melihat manfaat fleksibilitas kurikulum, tetapi proses adaptasi juga berkaitan dengan kompleksitas kerja dan perubahan budaya sekolah. Dengan kata lain, kebebasan pedagogis bukan berarti pekerjaan menjadi lebih sederhana; justru keputusan pembelajaran yang sebelumnya telah ditentukan secara terpusat kini lebih banyak harus dipertimbangkan oleh guru. Berbagai studi implementasi menunjukkan pengalaman yang beragam. Sebagian guru mulai menyesuaikan perencanaan dan strategi pembelajaran, sementara sebagian lain masih berhadapan dengan keterbatasan pemahaman, fasilitas, pelatihan, dan sumber belajar. Studi pada guru sekolah dasar, misalnya, menemukan bahwa pemahaman terhadap kebijakan tidak selalu diikuti dukungan sekolah yang memadai (Prihastari & Widyaningrum, 2024; Rozak et al., 2024). Pada konteks lain, guru menghadapi tantangan ketika harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan jumlah siswa besar dan kemampuan yang beragam (Firmansyah et al., 2024). Karena itu, implementasi Kurikulum Merdeka perlu dibaca sebagai proses perubahan yang melibatkan guru, pimpinan sekolah, peserta didik, keluarga, dan ekosistem kebijakan. Artikel ini menelaah temuan-temuan penelitian kualitatif dan kajian relevan untuk menjawab tiga pertanyaan: bagaimana guru menerjemahkan kurikulum ke dalam praktik; tantangan apa yang paling sering muncul; dan dukungan seperti apa yang dapat membuat fleksibilitas kurikulum benar-benar bermakna bagi pembelajaran.

B. Metodologi

Artikel ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur kualitatif dengan sintesis tematik. Literatur ditelusuri melalui laman jurnal ilmiah dan hasil pencarian akademik menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan "Kurikulum Merdeka", "implementasi", "kesiapan guru", "perencanaan pembelajaran", "diferensiasi", dan "asesmen". Sepuluh artikel dipilih secara

purposif berdasarkan keterkaitannya dengan fokus kajian, kejelasan informasi bibliografis, serta relevansinya terhadap praktik implementasi di sekolah. Sebagian besar artikel terbit pada 2023–2025 dan menggunakan pendekatan kualitatif, studi kasus, fenomenologi, atau kajian literatur. Analisis dilakukan dengan membaca tujuan, konteks, metode, dan temuan utama setiap artikel, kemudian mengelompokkan temuan ke dalam tema yang berulang. Tema tersebut meliputi pemahaman dan kesiapan guru, perencanaan pembelajaran, praktik diferensiasi dan asesmen, dukungan sekolah, serta kesenjangan sumber daya. Kajian ini bukan systematic review yang mengklaim mencakup seluruh publikasi tentang Kurikulum Merdeka. Oleh sebab itu, sintesis dimaksudkan untuk memetakan pola dan persoalan yang muncul dalam literatur terpilih, bukan untuk menghitung prevalensi nasional atau menyimpulkan bahwa seluruh sekolah mengalami keadaan yang sama.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Fleksibilitas kurikulum menuntut kesiapan profesional guru

Salah satu gagasan utama Kurikulum Merdeka adalah memberi ruang bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi peserta didik. Dalam praktiknya, ruang tersebut menuntut pemahaman yang memadai terhadap arah kurikulum. Guru perlu membedakan antara tujuan pembelajaran yang harus dicapai dan pilihan strategi yang dapat disesuaikan. Candra dan Wahzudik (2024), melalui eksplorasi fenomenologis, menemukan bahwa guru memandang fleksibilitas sebagai peluang, tetapi kompleksitas perubahan dan tuntutan kerja turut memengaruhi penerimaan kebijakan. Temuan ini memperlihatkan bahwa perubahan kurikulum bukan hanya persoalan mengganti dokumen, melainkan juga membangun pemahaman dan kebiasaan profesional baru. Penelitian Prihastari dan Widyaningrum (2024) mengenai guru sekolah dasar serta Rozak et al. (2024) menunjukkan pentingnya dukungan untuk memperkuat pemahaman guru. Sementara itu, studi Halawa et al. (2024) tentang kesiapan guru Agama Katolik memperlihatkan bahwa guru dapat menyesuaikan praktik pembelajaran dan asesmen, tetapi masih mengalami kesulitan memperoleh modul ajar yang sesuai dengan mata pelajaran. Artinya, kesiapan tidak dapat dipahami sebagai sifat individual guru semata. Ia terbentuk melalui interaksi antara kompetensi, ketersediaan sumber belajar, kesempatan belajar profesional, dan dukungan institusi.

Perencanaan pembelajaran: dari dokumen menuju keputusan pedagogis

Perencanaan merupakan titik awal yang menentukan bagaimana kurikulum diterjemahkan ke dalam kegiatan belajar. Guru perlu membaca capaian pembelajaran, menyusun tujuan dan alur tujuan pembelajaran, lalu merancang modul ajar yang selaras dengan kebutuhan kelas. Studi Fadilla dan Febria (2024) di SD Negeri 2 Kaliore menggambarkan implementasi pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Sementara itu, Murwanti (2023) menemukan bahwa guru IPS menghadapi kesulitan dalam memahami capaian pembelajaran dan merumuskan tujuan yang mendorong kemampuan berpikir tingkat tinggi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kesiapan implementasi dapat bervariasi menurut konteks sekolah, mata pelajaran, dan pengalaman guru. Risiko yang perlu dihindari ialah menjadikan modul ajar sebagai tujuan akhir. Dokumen yang lengkap belum tentu mencerminkan pembelajaran yang responsif. Perencanaan seharusnya menjadi alat berpikir: siapa yang sudah memahami materi, siapa yang membutuhkan bantuan tambahan, konsep apa yang berpotensi disalahpahami, dan bukti belajar apa yang perlu diamati. Jika perencanaan hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, fleksibilitas kurikulum dapat berubah menjadi beban dokumentasi baru tanpa perubahan berarti dalam pengalaman siswa.

Pembelajaran berdiferensiasi dan kenyataan ruang kelas

Pembelajaran berdiferensiasi menempatkan keragaman siswa sebagai kondisi yang perlu direspons, bukan sebagai gangguan yang harus diseragamkan. Namun, pelaksanaannya memerlukan waktu, pengelolaan kelas, variasi bahan ajar, dan kemampuan memetakan kebutuhan belajar. Firmansyah et al. (2024) melaporkan bahwa guru bahasa Inggris di SMPN 7 Tanjungpinang menghadapi kesulitan menerapkan diferensiasi, antara lain karena jumlah siswa yang besar, keterampilan digital yang terbatas, serta perubahan cara penilaian. Tantangan ini mengingatkan bahwa tuntutan pedagogis tidak dapat dipisahkan dari kondisi kerja guru. Pada tingkat sekolah menengah, Putri dan Pranata (2024) juga mengidentifikasi kendala berupa kemampuan teknologi yang belum merata, kebiasaan mengajar konvensional, dan fasilitas yang

terbatas. Hal ini tidak berarti guru menolak perubahan. Dalam banyak kasus, praktik lama merupakan strategi yang telah mereka kuasai untuk mengelola kelas dengan sumber daya yang tersedia. Perubahan yang berkelanjutan perlu menyediakan ruang bagi guru untuk mencoba, merefleksikan hasil, dan memperbaiki pendekatan, bukan sekadar menuntut kepatuhan terhadap istilah baru.

Asesmen sebagai bagian dari proses belajar

Kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan siswa memerlukan asesmen yang tidak berhenti pada pemberian nilai akhir. Asesmen awal membantu guru mengenali titik berangkat siswa, sedangkan asesmen formatif memberi informasi untuk menyesuaikan pembelajaran selama proses berlangsung. Dalam studi kesiapan guru sekolah dasar, Romadhon et al. (2023) membahas perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen sebagai bagian yang saling terkait dalam implementasi. Halawa et al. (2024) juga mencatat praktik refleksi dan evaluasi setelah pembelajaran. Temuan tersebut menempatkan asesmen sebagai kegiatan pedagogis, bukan sekadar administrasi pelaporan. Meski demikian, asesmen bermakna membutuhkan pemahaman tentang tujuan belajar dan bukti yang relevan. Jika guru hanya mengganti format penilaian tanpa mengubah cara menggunakan hasilnya, asesmen belum sepenuhnya mendukung pembelajaran. Hasil asesmen semestinya membantu guru memutuskan apakah materi perlu dijelaskan kembali, apakah siswa memerlukan tantangan lebih lanjut, atau apakah strategi yang digunakan perlu diubah. Karena itu, pelatihan asesmen sebaiknya berbasis contoh praktik dan diskusi hasil kerja siswa, bukan hanya sosialisasi konsep.

Kepemimpinan sekolah, kolaborasi, dan dukungan sumber daya

Implementasi kurikulum tidak berlangsung dalam ruang hampa. Kepala sekolah menentukan apakah guru memiliki waktu untuk berkolaborasi, kesempatan mengikuti pelatihan, dan akses terhadap bahan ajar. Studi Trisna et al. (2024) tentang implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 3 Prabumulih menyoroti faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan. Candra dan Wahzudik (2024) juga menekankan peran pendampingan dan kolaborasi dalam membantu guru beradaptasi. Dengan demikian, dukungan sekolah bukan pelengkap, melainkan bagian dari kondisi yang memungkinkan kebijakan dijalankan.

Kolaborasi dapat mengambil bentuk sederhana tetapi konsisten: guru merancang pembelajaran bersama, menelaah hasil asesmen, berbagi modul yang telah diuji, dan mendiskusikan respons siswa. Komunitas belajar akan lebih berguna jika berangkat dari persoalan nyata di kelas, bukan hanya menjadi forum penyampaian informasi. Sekolah juga perlu memberi ruang bagi guru untuk menyampaikan umpan balik mengenai kebijakan dan sumber belajar yang belum sesuai dengan

Pembahasan

Secara keseluruhan, temuan literatur menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka merupakan proses penerjemahan kebijakan ke dalam keputusan pedagogis sehari-hari. Tiga lapisan saling berhubungan: pemahaman guru terhadap tujuan kurikulum, kapasitas untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran, serta lingkungan sekolah yang menyediakan dukungan. Ketika salah satu lapisan lemah, fleksibilitas yang dijanjikan kurikulum dapat menyusut menjadi pekerjaan administratif atau penerapan yang bersifat formal. Pertama, pengembangan profesional guru perlu berkelanjutan dan dekat dengan praktik. Pelatihan satu kali mungkin membantu memperkenalkan istilah dan dokumen, tetapi belum tentu cukup untuk mengubah cara merancang pembelajaran, melakukan diferensiasi, atau memanfaatkan asesmen. Guru membutuhkan pendampingan, contoh perangkat ajar yang kontekstual, kesempatan menguji strategi, serta umpan balik. Kedua, kepemimpinan sekolah perlu melindungi waktu kolaborasi dan mendorong budaya refleksi. Ketiga, dukungan kebijakan harus memperhitungkan variasi kapasitas sekolah, termasuk akses terhadap teknologi, bahan ajar, dan sumber daya manusia. Kedua, keberhasilan tidak seharusnya disimpulkan hanya dari keberadaan dokumen kurikulum atau jumlah guru yang telah mengikuti pelatihan. Indikator yang lebih dekat dengan tujuan pendidikan ialah apakah siswa memperoleh kesempatan belajar yang sesuai kebutuhannya, apakah guru menggunakan informasi asesmen untuk memperbaiki pembelajaran, dan apakah partisipasi serta pemahaman siswa berkembang. Pengukuran semacam ini membutuhkan evaluasi yang berkelanjutan dan tidak semata-mata bersifat administratif. Ketiga, penelitian berikutnya perlu memperluas konteks dan membandingkan pengalaman sekolah dengan kondisi yang berbeda. Sepuluh artikel dalam kajian ini memberikan gambaran tematik, tetapi belum mewakili seluruh jenjang, wilayah, mata pelajaran, dan tipe satuan pendidikan. Studi

longitudinal juga diperlukan untuk melihat apakah perubahan praktik bertahan setelah fase awal implementasi. Selain itu, suara siswa dan orang tua perlu lebih banyak dihadirkan agar evaluasi tidak hanya bertumpu pada perspektif pelaksana kebijakan.

D. Kesimpulan

Implementasi Kurikulum Merdeka membuka peluang bagi pembelajaran yang lebih fleksibel dan berpusat pada peserta didik, tetapi pelaksanaannya menuntut kesiapan guru dan dukungan kelembagaan yang nyata. Literatur menunjukkan tantangan pada pemahaman capaian pembelajaran, perencanaan, diferensiasi, asesmen, pemanfaatan teknologi, serta ketersediaan sumber belajar. Tantangan tersebut tidak dapat dibebankan kepada guru sebagai individu karena berkaitan pula dengan kepemimpinan sekolah, pelatihan, kolaborasi, dan ketimpangan fasilitas.

Kurikulum Merdeka akan lebih bermakna apabila fleksibilitas diterjemahkan menjadi keputusan pembelajaran yang membantu siswa belajar, bukan sekadar menjadi dokumen yang harus diselesaikan. Karena itu, dukungan profesional yang berkelanjutan, evaluasi berbasis pengalaman belajar siswa, dan kebijakan yang peka terhadap perbedaan kondisi sekolah merupakan unsur penting dalam memperkuat implementasinya. Kesimpulan ini perlu dibaca sebagai sintesis atas literatur terpilih, bukan generalisasi untuk seluruh sekolah di Indonesia.

E. Referensi

- Candra, G. E., & Wahzudik, N. (2024). Teachers' interpretation of the Merdeka curriculum as a policy innovation: A phenomenological exploration. **Indonesian Journal of Curriculum and Educational Technology Studies*. <https://doi.org/10.15294/ijcets.v12i1.16283>
- Fadilla, R. D., & Febrianta, Y. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka di SD Negeri 2 Kaliori. (*Jurnal Sekolah*), 314–323. <https://doi.org/10.24114/js.v8i2.56987>
- Firmansyah, B. N., Andri, Zachary, F. A., Ket, & Pohan, E. (2024). Implementing of Kurikulum Merdeka: Challenges in teaching English at SMPN 7 Tanjungpinang. *JET (Journal of English Teaching)* Adi Buana, (2). <https://doi.org/10.36456/jet.v9.n02.2024.9896>
- Halawa, A. A., Zulkarnain, R., Kurniati, Y., & Imakulata, A. (2024). Penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah menengah pertama: Studi kualitatif mengenai kesiapan Guru Agama Katolik. **DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik*, (1). <https://jurnal.uns.ac.id/jdc/article/view/84548>
- Lisan, K. H., & Kholis, A. (2024). The analysis of Kurikulum Operasional Madrasah as the implementation of Merdeka curriculum. *JALL (Journal of Applied Linguistics and Literacy)*, <https://jurnal.unigal.ac.id/jall/article/view/12589>
- Murwanti, M. P. (2023). Problematika implementasi Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran IPS di SMP Kecamatan Temon tahun pelajaran 2022/2023. *Social Studies*, <https://journal.student.uny.ac.id/social-studies/article/view/20449>
- Prihastari, E. B., & Widyaningrum, R. (2024). Pemahaman guru terhadap implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar. *Paedagogia: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Kependidikan*, 15 (1). <https://journal.ummat.ac.id/index.php/paedagogia/article/view/20220>
- Putri, M. T., & Pranata, O. D. (2024). Merdeka Curriculum implementation at secondary schools: Science teachers' perspective. *International Journal of Education and Curriculum Application*, 7*(3). <https://journal.ummat.ac.id/index.php/IJECA/article/view/26282>
- Romadhon, K., Rokhimawan, M. A., Irfan, I., Fajriyani, N. A., Wibowo, Y. R., & Ayuningtyas, D. R. (2023). Analisis kesiapan guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka (studi kasus di SD Negeri 1 Ulak Kedondong). *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 7*(3). <https://www.jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-madrasah/article/view/2239>
- Rozak, R. W. A., Kembara, M. D., Praja, W. N., & Warsihna, J. (2024). Analysis of teachers' understanding of implementing the Merdeka Curriculum in primary schools. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Research*, 4*(1). <https://ejournal.upi.edu/index.php/IJOMR/article/view/72830>
- Trisna, N., Arafat, Y., & Furkan, N. (2024). Liberating learning: Insights into the Merdeka Curriculum implementation. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, <https://doi.org/10.26858/jiap.v14i1.64713>